

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

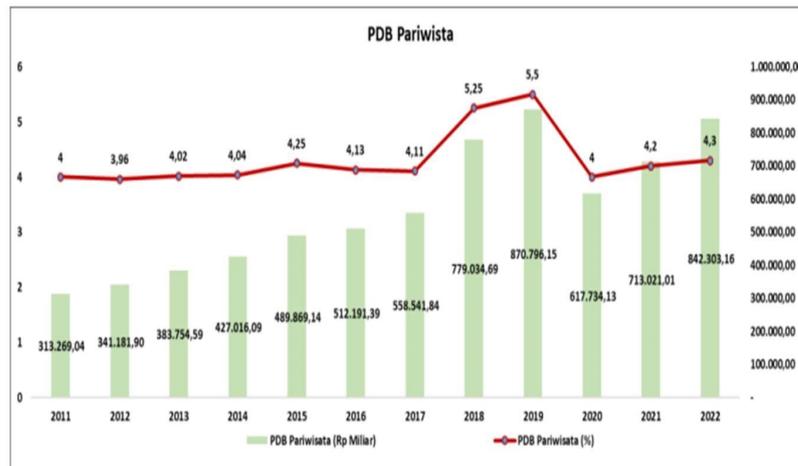
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang indah tentu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan untuk berbagai sektor. Kekayaan flora, fauna dan budaya dengan berbagai keunikan yang dimiliki menjadi potensi yang sangat besar dan memberikan daya tarik tersendiri terlebih pada kepariwisataan di Indonesia. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini menjadi *leading sector* yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pariwisata juga mampu menjadi sumber pendapatan dengan menciptakan berbagai bentuk usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Legowo & Priyatiningih, 2024).

World Tourism and Travel Council (dalam Utami & Kafabih, 2021) menyatakan bahwa pariwisata diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan bepergian ke dan tinggal di suatu tempat yang dilakukan dengan maksud kesenangan atau kepentingan lainnya di luar lingkungan masyarakat, provinsi dan negara tertentu dalam jangka waktu sementara waktu. Selanjutnya, Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas berwisata yang didasari oleh bermacam-macam sarana prasarana dan juga penyediaan layanan oleh masyarakat, swasta, serta pemerintah.

Menurut Elistia (2020) saat ini sektor pariwisata sebagai prioritas utama pemerintah karena memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan penelitian Amaliyah & Musa (2022) yang menyatakan bahwa pariwisata menjadi salah satu bidang pembangunan ekonomi yang memiliki pertumbuhan paling cepat sehingga memiliki peranan penting dalam pembangunan. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi aset strategis dalam memfasilitasi pengembangan di daerah potensial untuk mengembangkan objek pariwisatanya. Pariwisata dianggap memiliki kesiapan yang lebih matang dari segi fasilitas dan infrastrukturnya dibandingkan dengan sektor lain karena modal utama dari pariwisata itu sendiri berasal dari potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Sektor pariwisata memiliki prospek yang menjanjikan sebagai salah satu penggerak utama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga pariwisata menjadi industri yang sangat penting bagi suatu negara atau daerah (Muslimah dkk., 2024). Semakin meningkatnya daya tarik sektor pariwisata maka akan berbanding lurus dengan banyaknya mobilitas wisatawan pada objek wisata tersebut dan berdampak pula pada meningkatnya jumlah pendapatan negara sektor pariwisata. Pendapatan negara yang kian meningkat, memungkinkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya juga ikut mengalami kenaikan. Dengan demikian, sektor pariwisata memiliki potensi untuk memperkuat perekonomian di Indonesia melalui pemasukan devisa negara (Yuliandari & Netrawati, 2024). Hal ini didukung dengan tingkat

kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya.



Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Tahun 2011 – 2023

Sumber : Laman Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023

Gambar 1.1 menunjukkan terjadinya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata secara stabil sekaligus menjadi sektor unggulan dalam penerimaan PDB pada periode tahun 2011 - 2019. Total kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni sebesar 4% yang disebabkan akibat Pandemi Covid - 19. Kemudian, tahun 2021 PDB Pariwisata mulai membaik kembali namun nilainya masih rendah dibandingkan sebelum Pandemi Covid - 19. Pada tahun 2022, jumlah PDB sektor pariwisata meningkat kembali sejumlah 4,3% sehingga memberikan dampak positif bagi negara.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya yang dilakukan secara bertahap guna membangun pariwisata yang lebih baik kedepannya agar meningkatkan perhatian wisatawan melalui perbaikan kualitas objek wisata

(Nur dkk., 2022). Pengembangan pariwisata dilakukan guna menyetarakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian pelayanan yang terbaik kepada para pengunjung, serta melindungi lingkungan maupun melestarikan keanekaragaman budaya. Suatu daerah atau negara dapat menarik dan mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar jika pengembangan pariwisata dilakukan secara maksimal, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi baik bagi daerah maupun masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya formulasi dengan melibatkan seluruh *stakeholders* agar pengelolaan dan pengembangan pariwisata mampu terlaksana secara optimal dan efektif (Fatin dkk., 2024).

Stakeholders adalah individu atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi, baik secara positif maupun negatif dari suatu kegiatan atau tujuan yang dimiliki oleh organisasi (Talib, 2021). Terdapat tiga *stakeholders* utama dalam pelaksanaan suatu program yang memiliki perannya masing, yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Pentingnya peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata didukung oleh pendapat Wanner (dalam Destiana dkk., 2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan *stakeholders* dapat menciptakan perencanaan strategi pariwisata yang baik, mengurangi potensi konflik selama implementasi program, serta menyatukan seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada konteks pengembangan pariwisata untuk mencapai keberhasilannya diperlukan daya dukung yang optimal baik dukungan lingkungan, dana,

aksesibilitas dan sarana prasarana. Dengan demikian, keterlibatan para *stakeholders* memiliki peranan yang krusial sebab pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan pariwisata tidak hanya oleh satu sektor saja melainkan membutuhkan peran dan keterlibatan dari seluruh *stakeholders*. Lebih lanjut, Destiana dkk., (2020) menyatakan bahwa peran *stakeholders* sangat krusial dalam pengembangan pariwisata, karena keterlibatan aktif dari para *stakeholders* memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan pariwisata yang efisien dan mendukung tercapainya tujuan pariwisata yang berkelanjutan.

Pentingnya peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata juga dijelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 5, bahwa kepariwisataan diselenggarakan salah satunya berprinsip “menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan”. Selaras dengan hal tersebut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, juga menegaskan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan standar destinasi pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan dari para *stakeholders* yaitu pemerintah, sektor publik, dan swasta untuk mencapai tujuan.

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki beragam kearifan lokal dan keindahan alam di berbagai daerahnya. Dalam mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

mencanangkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Dalam mendukung upaya tersebut, Pemerintah Jawa Tengah melaksanakan Gerakan Bersama yakni mengikutsertakan seluruh *stakeholders* baik pemerintah maupun non pemerintah dalam setiap rencana aksi yang dilakukan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengembangkan destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

Tahun	Wisatawan		Jumlah Total
	Domestik	Mancanegara	
2019	57.900.663	691.699	58.592.562
2020	22.629.085	78.290	27.334.202
2021	21.332.409	1.793	21.334.202
2022	46.465.437	144.691	46.610.128
2023	56.485.087	464.719	56.949.806

Sumber : Telah diolah kembali dari Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 – 2023 jumlah kunjungan wisata domestik dan mancanegara di Jawa Tengah mengalami peningkatan cukup signifikan, kecuali pada tahun 2020 – 2021. Penurunan pada kurun dua tahun tersebut diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengganggu seluruh sektor. Akan tetapi, tahun 2022 – 2023 jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dan jauh melampaui target yang ditetapkan. Kenaikan jumlah wisatawan ini tentunya tidak terlepas

dari berkurangnya penyebaran Covid - 19 serta kuatnya daya tarik wisata Jawa Tengah yang terus memikat minat para wisatawan.

Jumlah wisatawan di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan cukup tinggi sehingga secara tak langsung mampu mendorong berbagai daerah di Jawa Tengah untuk saling berlomba guna meningkatkan sektor pariwisata.

Tabel 1.2 Kabupaten dengan Jumlah Wisatawan Terbanyak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah Wisatawan
1	Kabupaten Klaten	6.457.057
2	Kabupaten Semarang	3.534.130
3	Kabupaten Banyumas	3.526.655
4	Kabupaten Magelang	3.444.625
5	Kabupaten Demak	2.745.040

Sumber : Telah diolah kembali dari Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 di lima kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dimana Kabupaten Semarang menduduki peringkat ke-dua yakni dengan jumlah wisatawan sebanyak 3.534.130 orang, sedangkan jumlah wisatawan terbanyak ada di Kabupaten Klaten dengan 6.457.057 wisatawan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata cukup besar dan termasuk dalam destinasi wisata unggulan, dengan jumlah kunjungan wisatawan yang relatif tinggi, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Wisatawan Kabupaten Semarang Tahun 2019 - 2023

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2019	3.372.791	8.999	3.381.790
2020	1.294.955	833	1.295.788
2021	1.451.670	217	1.451.887
2022	3.774.942	1.029	3.775.971
2023	3.477.066	2.344	3.479.410

Sumber : Telah diolah kembali dari Kabupaten Semarang dalam Angka 2024

Berdasarkan pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Semarang mengalami penurunan dari tahun 2019 dan terus menurun hingga tahun 2020 – 2021. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid – 19 dan kurangnya promosi pariwisata. Melihat kondisi tersebut, pemerintah setempat saling bahu membahu untuk memulihkan sektor pariwisata dan pada akhirnya pada tahun 2022 - 2023 pariwisata Kabupaten Semarang mulai bangkit kembali sehingga jumlah wisatawan meningkat.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2025 menjadi dasar kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang. Peraturan tersebut mencakup visi, rencana, dan arah pengembangan kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai destinasi wisata unggulan, berdaya saing dan

ADEM (Asri, Dinamis, Ekologis, Mandiri)". Selain itu, peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam pembangunan pariwisata diperlukan keterlibatan peran *stakeholders* melalui proses perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui melalui kerjasama yang seimbang dan peran yang saling mendukung antar pihak terkait.

Museum dan Monumen Palagan Ambarawa merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang terletak di Desa Panjang Lor, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Objek wisata ini didirikan pada tahun 1973 dan resmi dibuka pada 15 Desember 1974 oleh Presiden Soeharto. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 pada pasal 14 (ayat 1) huruf b bahwa Museum dan Monumen Palagan Ambarawa termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Semarang (KSPK) karena daya tarik wisata ini memiliki potensi untuk dilakukannya pengembangan pariwisata.

Tabel 1.4 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Objek Wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2023

Objek Wisata	Jumlah wisatawan			Total
	2021	2022	2023	
Candi Gedong Songo	150.375	425.738	358.159	934.272
Pemandian Muncul	42.323	142.440	106.844	291.607
Muncul Waterpark	0	55.799	46.091	101.890
Bukit Cinta	61.308	203.594	171.304	436.306
Palagan Ambarawa	567	28.847	29.468	58.882

Sumber : Telah Diolah Kembali dari Kabupaten Semarang dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2023, tingkat kunjungan wisatawan ke Museum dan Monumen Palagan Ambarawa terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, dibandingkan dengan objek wisata lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah jumlah kunjungan wisatawan ke Museum dan Monumen Palagan Ambarawa relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah belum memberikan perhatian penuh dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata ini, sehingga minat wisatawan masih tergolong rendah. Menurut Chaniago (2024) pertumbuhan sektor dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan sehingga kondisi tersebut tentunya berdampak pada pendapatan yang dihasilkan oleh objek wisata Palagan Ambarawa.

**Tabel 1.5 Data Pendapatan Objek Wisata yang Dikelola Dinas
Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2023**

Objek Wisata	Tahun		
	2021	2022	2023
Candi Gedong Songo	770.132.000	2.142.867.183	4.171.075.000
Pemandian Muncul	132.719.415	452.133.000	1.334.117.500
Muncul Waterpark	0	457.435.000	762.875.000
Bukit Cinta	1.410.649.870	1.703.758.667	2.184.360.000
Palagan Ambarawa	4.489.000	106.012.000	189.890.000

Sumber : Telah diolah kembali dari Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka 2021 - 2023

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa pendapatan objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dari tahun 2021 hingga tahun 2023 khususnya pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa paling sedikit, dibandingkan dengan objek wisata lainnya. Hal tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang.

Peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan objek wisata. Apabila ditinjau dari pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa terdapat permasalahan salah satunya terkait dengan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai aktor utama dalam hal pengadaan dan penyediaan fasilitas. Kondisi objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa dapat dikatakan sangat memprihatinkan serta tidak terawat dengan baik, sehingga potensi objek wisata ini kurang diminati oleh pengunjung.

Sebagaimana hasil penelitian Nur dkk., (2022) pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa terkendala pada alokasi anggaran yang masih belum mencukupi untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pada objek wisata tersebut.



Gambar 1. 2 Fasilitas Kurang Memadai di Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa sarana prasarana yang ada di Museum dan Monumen Palagan Ambarawa masih ditemukan beberapa kondisi yang tidak layak seperti fasilitas tempat duduk yang sudah berkarat, kondisi ayunan dan perosotan anak yang kurang aman, tidak ada akses untuk penyandang disabilitas dan beberapa fasilitas pendukung lainnya yang tidak layak. Terlebih lagi sebagian besar para pengunjung membawa anak-anak bermain di objek wisata ini sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kenyamanan bagi pengunjung.

Selanjutnya, Koordinator lapangan pengelola objek wisata di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memiliki peran sebagai

pelaksana kegiatan pariwisata. Namun, jumlah tenaga kerja yang ada di Museum dan Monumen Palagan Ambarawa masih mengalami kekurangan sehingga menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan secara optimal. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih belum memadai terutama saat hari libur dengan lonjakan pengunjung yang tinggi sehingga pengelolaan dan pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di lapangan, dimana dari perspektif keamanan dan kenyamanan, masih sangat kurang diperhatikan, sehingga berpotensi membahayakan para pengunjung.



Gambar 1. 3 Ulasan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Sumber : Diolah dari Google.maps, 2024

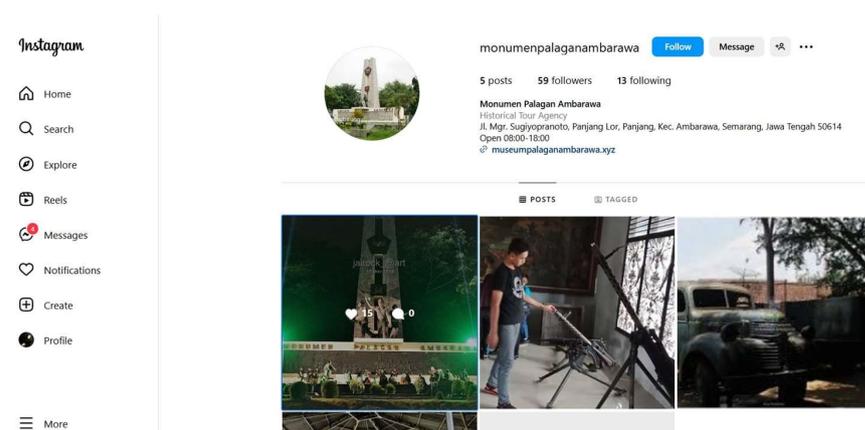
Gambar 1.3 menunjukkan ulasan media *googlemaps.com* dari beberapa wisatawan yang mengunjungi Museum dan Monumen Palagan Ambarawa. Dari ulasan tersebut terlihat bahwa ada rasa ketidakpuasan dari para wisatawan yang berkunjung terkait dengan situasi keamanan di area objek wisata. Banyak yang berpendapat bahwa fasilitas keamanan dari area bermain untuk anak-anak

kurang diperhatikan sehingga membahayakan ketika digunakan oleh pengunjung khususnya bagi anak-anak.

Permasalahan selanjutnya dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur dkk., (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa”, menemukan sebuah masalah yaitu masih lemahnya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai *stakeholders* pariwisata khususnya pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa yang diakibatkan karena intensitas komunikasi antar *stakeholders* yang terlibat masih belum efektif dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah.

Sinergitas dan kemitraan antar *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa juga belum optimal. Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Koordinator lapangan bahwa dalam pengembangan objek wisata Monumen Palagan Ambarawa belum ada keterlibatan pihak bisnis atau privat. Salouw (2021) menyebutkan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata. Melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat memaksimalkan sumber daya yang ada (Indah & Risty, 2024). Dengan demikian, tidak adanya peran sektor swasta ini mengakibatkan perkembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa belum optimal.

Pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa pada dasarnya harus diimbangi dengan promosi pariwisata. Akan tetapi, sejauh ini, kegiatan promosi objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa belum dilaksanakan secara optimal karena minimnya potensi objek wisata serta promosi yang dilakukan cenderung tidak menarik dan tidak atraktif. Promosi Museum dan Monumen Palagan Ambarawa melalui akun Instagram <https://www.instagram.com/monumenpalaganambarawa/>. Adanya akun Instagram tersebut diharapkan dapat memperkenalkan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

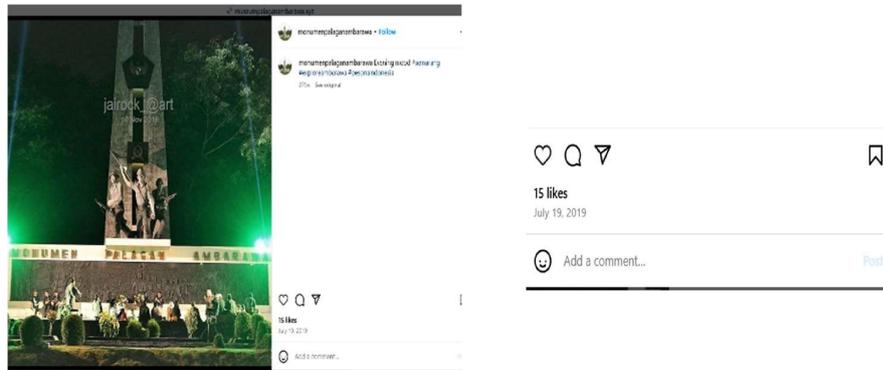


Gambar 1. 4 Beranda Akun Media Sosial Instagram Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Sumber : Akun Instagram Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Namun, mengacu pengamatan penulis, aktivitas dari akun Instagram tersebut tidak dijalankan secara berkelanjutan dibuktikan dengan postingan terakhir yang diunggah pada tahun 2019 atau sekitar 6 tahun yang lalu dan jumlah pengikut yang sangat sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

media massa yang digunakan masih belum berkembang dengan baik dalam memaksimalkan promosi.



Gambar 1.5 Postingan Terakhir Instagram Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Sumber : Akun Instagram Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Peran masyarakat dalam mendukung pengembangan objek wisata terbilang kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sektor pariwisata dengan ikut melaksanakan, menjaga dan merawat objek wisata. Selain itu, masyarakat juga menganggap jika yang memiliki kuasa penuh untuk mengembangkan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa hanya pemerintah daerah saja sehingga mereka tidak memiliki andil dalam pengembangan objek wisata tersebut.

Peran *stakeholders* sangat diperlukan dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang karena dalam pengembangan objek wisata sangat memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan pada fungsi dan

kedudukannya. Dengan demikian, pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga beberapa *stakeholders* lainnya yang ikut terlibat. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai analisis peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa untuk mengetahui masalah pernyataan penelitian **“Mengapa peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa masih belum optimal?”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Belum terciptanya sinergitas antar *stakeholders* terutama dengan pihak swasta atau privat sehingga menghambat proses pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
2. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terutama dalam pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana yang belum memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung objek wisata.
3. Kurang optimalnya peran koordinator lapangan karena keterbatasan sumber daya manusia yakni kurangnya jumlah tenaga kerja atau pengelola yang ada di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
4. Media promosi wisata yang masih belum digunakan secara optimal mengakibatkan kurangnya daya tarik masyarakat maupun wisatawan

terhadap keberadaan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

5. Kurang optimalnya partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mempelajari suatu permasalahan dan mampu menyumbangkan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang difokuskan pengembangan pariwisata dengan teori tentang identifikasi dan peran *stakeholders*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis terkait dengan peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, atau sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang mengambil fokus penelitian yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Semarang khususnya Dinas Pariwisata

Kabupaten Semarang terkait dengan kondisi peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang. Diharapkan hal ini juga dapat mendorong masyarakat berkontribusi secara aktif untuk menjalankan perannya sehingga dapat mewujudkan potensi wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa ke arah yang lebih baik.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
1.	Bonaventura Daputra Agam, I Wayan Mertha dan I Gede Gian Saputra (2024) Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Lodok, Desa Poco Rutang, Kabupaten Manggarai Barat	Teori pentahelix menurut Lindmark (2009) yang memiliki 5 komponen <i>stakeholders</i> yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Lodok berdasarkan pengaruh dan kepentingannya yakni pemerintah dan komunitas termasuk dalam tipe players, pelaku bisnis termasuk tipe crowd, media termasuk tipe context setter dan akademisi termasuk dalam tipe subject.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus yang sama terkait peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus pada objek wisata Lodok di Kabupaten Mangarai Barat sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
2.	Zam Masrurun dan Dyah Meutia Nastiti (2023)	Teori analisis <i>stakeholders</i> menurut Reed et.al (2009) yakni	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus sama mengenai peran <i>stakeholders</i>

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Analisis <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo	identifikasi <i>stakeholders</i> , klasifikasi <i>stakeholders</i> serta teori kategorisasi <i>stakeholders</i> menurut Bryson (2016) yakni <i>key player</i> , <i>subject</i> , <i>context setter</i> dan <i>crowd</i> .		Kabupaten Wonosobo bergantung pada efektivitas dan kolaborasi antar <i>stakeholders</i> sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas antar lembaga dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar instansi.	dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus di Pariwisata Kabupaten Wonosobo sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Kabupaten Semarang.
3.	Fahad Mursyid Jannata, AUFARUL MAROM dan HERBASUKI NURCAHYANTO (2023) Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan	a. Teori identifikasi <i>stakeholders</i> menurut Viney (dalam Suwitri, 2011) yakni primer, sekunder, tersier dan kwarter. b. Teori peran <i>stakeholders</i> menurut Nugroho (dalam	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, masyarakat, pemerintah, dan media massa. Para pemangku kepentingan ini dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, yakni menjadi kelompok primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, peran mereka terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu policy creator, koordinator, fasilitator, pelaksana (implementor), dan akselerator. Faktor-faktor yang	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus sama mengenai peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Kabupaten Semarang.

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Gunungpati, Kota Semarang	Handayani, 2017) yakni policy creator, koordinator, fasilitator dan akselerator.		mendukung atau menghambat peran mereka mencakup nilai-nilai, komunikasi, kepercayaan, serta kebijakan.	
4.	Fiqi Susanto dan Sri Indarti (2023) Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu	Teori peran <i>stakeholders</i> menurut Nugroho (2015) yakni policy creator, koordinator, fasilitator, implementator dan akselerator.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Tangsi Duren di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, telah berjalan dengan baik. Namun, tidak semua pihak yang terlibat telah melaksanakan tugas dan peran mereka secara optimal.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus sama mengenai peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus di Desa Wisata Tangsi Duren, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
5.	Nyken Ayu Phytaloka Gayatri, Hardi Warsono Dan Slamet Santoso (2023)	a. Teori identifikasi <i>stakeholders</i> menurut Townsley (dalam	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang terbagi menjadi <i>stakeholders</i> primer (lembaga	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus sama mengenai peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	Hidayah, dkk, 2019) yakni <i>stakeholders</i> primer dan <i>stakeholders</i> sekunder. b. Teori peran <i>stakeholders</i> menurut Nugroho (2015) yakni Lembaga Swadaya Masyarakat, konsumen, penduduk lokal, pemerintah dan akademisi.		swadaya masyarakat dan masyarakat lokal) dan <i>stakeholders</i> sekunder (pemerintah, akademisi dan konsumen). Akan tetapi, terdapat beberapa <i>stakeholders</i> yang tidak menjalankan perannya dengan optimal yang disebabkan karena kurangnya kompetensi dari anggota pokdarwis dan kurangnya partisipasi anggota pokdarwis.	mengambil lokus di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Kabupaten Semarang.
6.	Grace Ginting, Kismartini, Tri Yuniningsih & Teuku Afrizal (2022) Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam	Teori <i>stakeholders</i> menurut Rahmi (dalam Alamsyah, 2016) yang menyatakan <i>stakeholders</i> berperan penting dalam pengembangan	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Kawasan wisata Siosar belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kontribusi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus yang sama yakni peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini mengambil lokus pada objek wisata Siosar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Pengembangan Pariwisata Siosar, Kabupaten Karo, Sumatra Utara	pariwisata yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.		dan tanggung jawab di antara pihak pihak yang terlibat.	mengambil lokus pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
7.	Fanny Soselissa dan Billy Seipalla (2021) Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Siwang Paradise Di Desa Siwang Kota Ambon	Teori identifikasi <i>stakeholders</i> menurut Maryono (2005) yakni <i>stakeholders</i> primer, <i>stakeholders</i> sekunder, dan <i>stakeholders</i> kunci.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan objek wisata Siwang Paradise melibatkan beberapa <i>stakeholders</i> . pemilik kawasan sebagai <i>stakeholder</i> kunci dan masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat dukungan dari pihak lain seperti pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (<i>LSM</i>), yang berperan sebagai <i>stakeholder</i> pendukung.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus dan teori yang sama yakni peran <i>stakeholders</i> pengembangan objek wisata yang diidentifikasi dengan teori (Maryono dkk., 2005). Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada lokus yang diambil. Dimana penelitian ini mengambil lokus pada objek wisata Alam Siwang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
8.	Jodi Hariawan, Yusri Abdillah dan Luchman Hakim (2020)	Teori <i>stakeholders</i> menurut Freeman dan McVea (2001) yang menyatakan terdapat 3	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq melibatkan peran penting dari para <i>stakeholders</i> , termasuk pemerintah,	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus yang sama yakni pengembangan pariwisata. Perbedaannya penelitian ini

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya	<i>stakeholders</i> kepariwisataan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.		pelaku usaha, dan masyarakat. Peran mereka diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan infrastruktur, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan komunitas lokal, serta promosi kawasan wisata.	mengambil lokus di Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq, Kabupaten Lombok Utara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
9.	Theodorus Filipus dan Bambang Hari Wibison (2021) Peran dan Koordinasi <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Jembatan Youtefa Kota Jayapura	Teori identifikasi peran <i>stakeholders</i> menurut Reed at al, (2009) yaitu subject, key players, context setters dan crowd.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Jembatan Youtefa, Kota Jayapura telah melaksanakan peran mereka sesuai dengan tugasnya. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa program pengembangan pariwisata karena adanya ego sektoral, keterbatasan anggaran, dan landasan hukum yang belum cukup kuat	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus yang sama yakni peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian. Dimana penelitian ini mengambil lokus Pariwisata di Kawasan Jembatan Youutefa sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil lokus di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
10.	Ahmad Hanif Nur R, Dyah Lituhayu, dan Titik Djumiarti (2022) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang Pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa	Model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Palagan Ambarawa belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Ditunjukkan dengan belum tercapainya tujuan dan sasaran dari kebijakan pengembangan pariwisata, antara lain seperti meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Selain itu juga terdapat beberapa faktor lain seperti perbedaan persepsi, kurangnya anggaran dan jumlah tenaga kerja.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan pada lokus yang sama yakni objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa. Perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dimana penelitian ini mengambil permasalahan mengenai implementasi kebijakan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata
11.	Wijayawardena, Sandanayake, dan Bandaranayake (2024) <i>The Role of stakeholders in business model innovation in construction</i>	Teori Model Bisnis (BM), Inovasi Model Bisnis (BMI), dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam konteks industri konstruksi di Sri Lanka menurut	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan <i>stakeholders</i> memiliki peran penting dalam pengembangan dan implementasi inovasi model bisnis. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan koordinasi masih menjadi hambatan untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi model bisnis.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus yang sama yakni peran <i>stakeholders</i> . Perbedaannya terletak pada lokus penelitian. Dimana penelitian ini mengambil lokus pada pengembangan inovasi <i>Business Model (BM)</i> di Sri Lanka, sedangkan penelitian yang akan

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	<i>organisations in Sri Lanka</i>	Alexander Osterwalder (2004).			dilakukan mengambil lokus di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
12.	Feyisetan Leo-Olagbaye, Henry Odeyinka, dan Pavithra Rathnasiri (2023) <i>Stakeholders Roles in the Delivery of Sustainable Housing Projects in Lagos State, Nigeria</i>	Teori <i>stakeholders</i> menurut R. Edward Freeman (1984) yang menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dapat menentukan kinerja suatu organisasi dan sebaliknya	Metode penelitian deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para stakeholder yang terlibat dalam proyek perumahan berkelanjutan di Lagos telah menyadari peran dan tanggung jawab mereka. Tingkat kesadaran bervariasi di antara kelompok yang berbeda, dan pentingnya peran pemerintah serta manajer proyek dalam mendorong keberhasilan proyek berkelanjutan. Selain itu, perlunya keselarasan peran para stakeholder untuk memastikan keberhasilan dan pengelolaan proyek yang efektif.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil fokus yang sama mengenai identifikasi peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni proyek perumahan di Nigeria sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengembangan objek wisata di Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang
13.	Derrick Noah Sentamu, Raphael Lotira Arasio, Haron Akala, Dennis N. Makau, Oliver Vivian Wasonga, dan	a. Teori analisis <i>stakeholders</i> menurut R. Edward Freeman (1984) yakni <i>stakeholders</i>	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>stakeholders</i> penggembala memiliki peranan penting dalam pelaporan dan respons penyakit ternak. Dalam hal ini <i>stakeholders</i> non-negara seperti LSM dan iNGO berkolaborasi dan mendukung	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti tentang peran dari para <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam suatu program. Perbedaannya adalah pada lokusnya dimana penelitian ini

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Joshua Orungo Onono (2024) <i>Stakeholder analysis and their roles in livestock disease reporting and response in Northern Kenya</i>	primer, <i>stakeholders</i> sekunder dan <i>stakeholders</i> kunci. b. Teori <i>stakeholders</i> menurut Mitchell, Agle, & Wood (1997) yakni power, legitimasi, dan urgensi.		Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya untuk mengelola wabah. Berbagai tantangan yang membatasi respons penyakit ternak disorot, tantangan yang paling sering berpusat pada jumlah yang rendah dan kekurangan sumber daya Pekerja Kesehatan Hewan.	berfokus pada pelaporan dan respons penyakit ternak di Kenya Utara sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
14.	Pearce Madhlambudzi & Christos I. Papanagnou (2020) <i>Stakeholder identification and salience in purchasing: an empirical study from UK hospitals</i>	Teori <i>stakeholders</i> menurut R. Edward Freeman yakni berdasarkan pada kekuasaan, urgensi, dan legitimasi	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam proses pengambilan keputusan rumah sakit umum di UK dilakukan dengan mempertimbangkan atribut kekuasaan, urgensi, legitimasi dan kedekatan.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang masing masing peran <i>stakeholders</i> yang terlibat. Perbedaannya adalah pada focus dan lokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada pertimbangan pengambilan keputusan di Rumah Sakit UK, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan wisata Museum

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
					dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
15.	Wang, J., & Aenis, T (2019) <i>Stakeholder analysis in support of sustainable land management: Experiences from southwest China</i>	Teori M. E. Porter dan M. R. Kramer (1997) yang mengklasifikasikan <i>stakeholders</i> berdasarkan pengaruh dan kepentingannya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program pengelolaan pertanahan daerah terdapat 3 stakeholder yang berperan yakni <i>policy creator</i> (pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan perusahaan swasta), koordinator yakni Petani sebagai <i>directs user</i> dan <i>Stakeholders</i> di tingkat provinsi.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi peran <i>stakeholders</i> yang terlibat. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengambil permasalahan pada pengelolaan lahan berkelanjutan. Penelitian yang akan dilakukan mengambil permasalahan pengembangan pariwisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.

Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai jurnal, 2024

Tabel 1.6 dimaksudkan untuk mengetahui posisi penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian yang membahas peran *stakeholders* dengan mengambil lokus yang sama dengan penelitian ini, yaitu terkait dengan peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Di Kabupaten Semarang belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6.2 Administrasi Publik

Masyarakat sering kali mendefinisikan istilah “administrasi” hanya sebatas pada aktivitas perkantoran seperti tulis menulis, surat menyurat, mengetik, pencatatan dan kegiatan administrasi lainnya yang dilakukan oleh pegawai. Akan tetapi, secara keilmuan kegiatan administrasi lebih dari sekedar kegiatan perkantoran. Sebagaimana pendapat A. Dunsire (dalam Keban, 2014:3) yang menjelaskan bahwa administrasi mencakup proses pengarahannya, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan publik termasuk penerapan prinsip-prinsip dalam implementasi kebijakan, aktivitas analisis, pertimbangan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok yang menciptakan produk berupa barang dan jasa.

Trecker, Donovan, dan Jackson (dalam Keban, 2014) menyebutkan administrasi adalah kegiatan yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang digerakan guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan melalui pengalokasian potensi organisasi yang dimiliki baik manusia maupun keuangan yang dilakukan dengan saling berkoordinasi dan bekerjasama. Sementara itu, Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:3) memberikan batas administrasi publik sebagai suatu penggabungan yang cenderung rumit antara teori dan praktik untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan peran lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik serta mendorong kebijakan publik agar memenuhi kebutuhan masyarakat lebih baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses yang melibatkan kerjasama antar *stakeholders* termasuk aparatur negara atau pemerintahan guna mewujudkan tujuan bersama dalam menjalankan kekuasaan. Proses ini harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan negara.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan konsep dalam bentuk sudut pandang, nilai, metode prinsip dasar dan tata cara digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada waktu tertentu. Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:3)

menjelaskan bahwa terdapat enam paradigma dalam administrasi publik yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Paradigma 1 (1900 – 1926) yaitu paradigma dikotomi politik dan administrasi. Diperkenalkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard White. Paradigma ini menyatakan politik berfokus pada kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sementara administrasi berperan sebagai alat untuk memantau dan memastikan keberlangsungan implementasi program yang dijalankan. Terjadi diferensiasi antara politik dan administrasi yang mengakibatkan pembagian dalam pemerintahan sehingga terbagi menjadi lembaga legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif.
2. Paradigma 2 (1927 – 1937) yaitu paradigma prinsip prinsip administrasi. Diperkenalkan oleh Willoughby, Gullick, dan Urwick. Paradigma ini mengenalkan prinsip prinsip administrasi sebagai fokus dari administrasi publik yakni POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Namun, paradigma ini kurang menjelaskan lokus yang mendalam sebab menganggap bahwa prinsip tersebut dapat digunakan secara global.
3. Paradigma 3 (1950 – 1970) yaitu paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma ini menganggap teori administrasi publik sebagai bagian dari teori politik. Dalam

paradigma ini, administrasi publik dianggap sebagai ilmu yang yang fokus utamanya pada birokrasi pemerintahan, sedangkan fokus lainnya menjadi samar sebab ilmu politik yang ada lebih dominan yang mengakibatkan prinsip-prinsip administrasi publik menjadi abstrak dan sulit dipahami.

4. Paradigma 4 (1956 – 1970), yakni administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini berfokus pada prinsip prinsip administrasi dalam administrasi publik. Akan tetapi, lokus paradigma ini menjadi abstrak sebab fokus yang dikembangkan tak hanya berfokus pada lingkup bisnis saja namun juga elaborasikan kedalam ilmu administrasi publik.
5. Paradigma 5 (1970 – sekarang), yakni paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik. Paradigma ini berfokus pada manajemen, organisasi dan kebijakan publik sebagai fokus teori, sedangkan lokusnya adalah kepentingan dan masalah publik.
6. Paradigma 6 (1990 – sekarang), yakni paradigma *governance*. Paradigma ini merupakan pendekatan yang muncul akibat pergantian konsep “*government*” yang kearah konsep “*governance*” sebagai akibat dari lembaga pemerintah yang seringkali ditemukan memonopoli penyelenggaraan pemerintahan sehingga dianggap kurang memadai untuk

menghadapi kompleksitas dalam kegiatan penyelenggaraan urusan publik.

Dari keenam paradigma administrasi publik di atas, penelitian yang akan dilakukan ini termasuk dalam paradigma keenam yakni Paradigma *Governance*, karena pada fokus penelitian ini menjelaskan mengenai analisis peran *stakeholders* dalam sebuah kegiatan pemerintah yang dilakukan dengan bekerjasama antar *stakeholders*. Penelitian ini juga tidak hanya menganalisis peran *stakeholders* dari sektor pemerintah saja namun juga sektor non-pemerintah.

1.6.4 Governance

Governance merupakan pelaksanaan pemerintahan sebagai peralihan dalam penyelenggaraan kebijakan publik dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* yang terkait saat pengambilan keputusan dan pelaksanaannya untuk mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Osborne (dalam Noor dkk., 2022) menyatakan bahwa *governance* merupakan pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah yang pada awalnya keputusan berada pada pemerintah sebagai *stakeholders* utama menjadi melibatkan banyak *stakeholders* baik dalam maupun luar pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian *governance* menjadikan pemerintah bukan lagi sebagai *stakeholders* utama dalam kebijakan publik melainkan

pemerintah menciptakan ruang *deliberative* dengan melibatkan *stakeholders* lain dalam pelaksanaan pemerintahan.

Rhodes (dalam Astuti dkk., 2020) menjelaskan bahwa *governance* memiliki beberapa karakteristik yakni 1) *governance* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *government* yakni dengan melibatkan berbagai pihak meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat; 2) interaksi antar pemangku kepentingan di latar belakang dari adanya kebutuhan negosiasi dan pertukaran sumber daya dan potensi yang dimiliki; dan 3) *governance* berakar dari hubungan yang dijalin dengan rasa kepercayaan dan terdapat aturan yang mengikat dari kesepakatan serta negosiasi antar *stakeholders* sebelumnya. Dwiyanti (dalam Astuti dkk., 2020) menyatakan bahwa dimensi *governance* dibagi menjadi tiga jenis, sebagai berikut :

1. Dimensi kelembagaan, merupakan dimensi yang dapat dipahami sebagai sistem administrasi dengan melibatkan berbagai pihak baik dari luar maupun dalam pemerintah.
2. Dimensi nilai, merupakan dimensi yang dapat dipahami sebagai acuan atau dasar dalam menggunakan kekuasaan. Dimensi nilai dipandang sebagai suatu hal yang dijadikan seorang individu sebagai prinsip dalam berperilaku yang digunakan pada saat berfikir dan berperilaku.
3. Dimensi proses, dimensi ini dapat dipahami sebagai cara pemerintah dalam merespons berbagai permasalahan publik yang

muncul. Selain itu, proses ini juga menjadi bentuk penggambaran mengenai Langkah-langkah atau tahapan yang jelas dalam pelaksanaan program terkait dan secara bersamaan dapat mengubah input menjadi hasil yang diinginkan.

Berkaitan dengan ketiga jenis dimensi *governance* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka fokus pada penelitian ini memiliki kaitan dengan dimensi kelembagaan sebab dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai analisis peran *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

1.6.5 Manajemen Publik

Manajemen menurut Handoko (dalam Berliandaldo et al., 2021) didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut, Handoko (dalam Firdausijah, 2023) menyatakan bahwa manajemen merupakan perpaduan antara seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Firdausijah (2023) juga berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu dalam suatu organisasi untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu upaya dalam mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya didalamnya.

Kaitannya dengan pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang yakni penerapan manajemen kebijakan yang efektif guna mencapai tujuan dan mengoptimalkan upaya yang dilakukan. Kurangnya pemahaman dalam mengelola kebijakan dapat menurunkan kualitas hasil dari hasil yang telah dilaksanakan.

1.6.6 Stakeholders

Ariyanto & Marom (2017) mendefinisikan *stakeholders* adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan berbeda-beda dan memiliki kemampuan untuk saling mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal. Sementara itu, Rhenald, 2003 (dalam Kusuma dkk., 2020) menyatakan bahwa *stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang ada di dalam maupun luar organisasi dimana peran dan fungsi yang dimilikinya dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Lebih lanjut, Usu dkk., (2022) mengemukakan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media dan akademisi dimana mereka menjadi suatu kelompok individu yang mendapatkan keuntungan atau kerugian atas pelaksanaan suatu program.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai *stakeholders* tersebut dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* merupakan seorang individu atau kelompok individu yang memiliki kepentingan berbeda-beda dan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi serta membawa konsekuensi atau terkena dampak dari suatu kebijakan atau program.

1.6.7 Identifikasi *Stakeholders*

Menurut Christopher Stoney dan Diana Winstanley (dalam Astuti dkk., 2020) identifikasi *stakeholders* adalah proses untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Dilakukannya identifikasi *stakeholders* untuk mengetahui secara sistematis berkaitan dengan hak, tanggung jawab serta siapa saja *stakeholders* yang terpengaruh dan memungkinkan untuk terlibat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Ardianto (dalam Wati & Kismartini, 2019) mengidentifikasikan *stakeholders* menjadi dua bagian, diantaranya:

- a. *Stakeholders* internal, pihak yang berada di dalam organisasi dan secara langsung terlibat dalam operasional serta pengambilan keputusan. Mereka memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan organisasi, dan keputusan organisasi juga secara langsung mempengaruhi mereka.

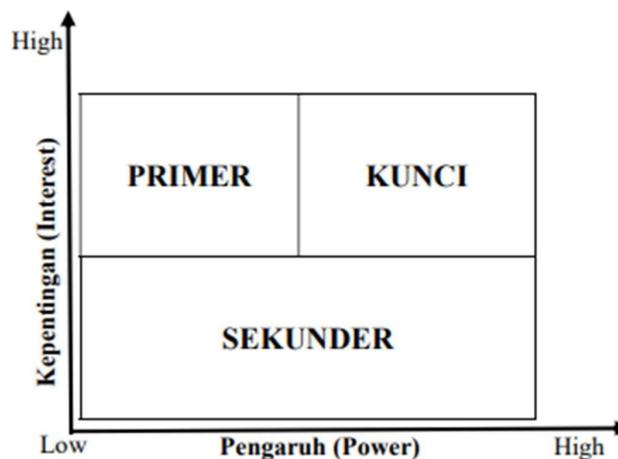
- b. *Stakeholders* eksternal, pihak diluar organisasi yang tidak terlibat langsung dalam operasional, tetapi tetap dipengaruhi oleh atau memiliki pengaruh terhadap organisasi. Hubungan mereka dengan organisasi biasanya bersifat tidak langsung dan dipengaruhi oleh hasil atau kebijakan organisasi.

Viney (dalam Suwitri, 2011) juga mengidentifikasikan *stakeholders* ke dalam empat kelompok, yakni:

- a. *Stakeholders* Primer adalah kelompok atau individu yang memiliki pengaruh dan kepentingan secara langsung dalam suatu program atau kebijakan yang terdampak secara positif maupun negative.
- b. *Stakeholders* Sekunder adalah kelompok atau individu yang memiliki pengaruh dan kepentingan secara tak langsung dalam suatu program atau kebijakan.
- c. *Stakeholders* Tersier adalah kelompok atau individu yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah dan terlibat secara tak langsung dengan organisasi atau proyek tertentu tetapi tetap dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi hasilnya.
- d. *Stakeholders* kwarter adalah kelompok atau individu yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah tetapi mereka tetap dapat dipengaruhi oleh hasilnya dalam jangka panjang.

Pendapat lain oleh Maryono dkk., (dalam Kesami dkk., 2021) yang mengidentifikasikan *stakeholders* menjadi:

1. *Stakeholders* Primer adalah pihak yang secara langsung terdampak oleh suatu kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. *Stakeholders* primer ini memiliki kepentingan paling kuat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Stakeholders* Sekunder (pendukung) adalah pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung dalam suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. *Stakeholders* sekunder memberikan dampak yang lebih kecil dalam proses pengambilan keputusan.
3. *Stakeholders* Kunci adalah pihak utama yang secara legalitas memiliki pengaruh, kepentingan atau kekuasaan tinggi dalam proses pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.



Gambar 1.6 Matriks Identifikasi *Stakeholders*

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan beberapa teori identifikasi *stakeholders* di atas, dalam analisis peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang peneliti menggunakan teori identifikasi *stakeholders* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya menurut Maryono dkk., (dalam Kesami dkk., 2021). Hal ini karena Teori Maryono mampu memahami seberapa besar tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder dalam suatu program.

1.6.8 Peran *Stakeholders*

Tindangen dkk., (2020) menyatakan peran sebagai suatu perilaku yang membatasi seseorang atau lembaga dalam melakukan suatu aktivitas yang didasarkan pada tujuan dan kondisi yang telah disepakati secara kolektif agar kegiatan tersebut dapat mencapai keberhasilan. Pendapat lain mengenai peran sebagaimana yang dinyatakan oleh Margayaningsih (2018) adalah keterlibatan, bentuk, kontribusi, serta organisasi kerja dalam penetapan tujuan yang ditampilkan oleh suatu entitas yang berdampak terhadap pihak-pihak lain atau suatu isu.

Peran *stakeholders* mengacu pada kontribusi dan partisipasi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. *Stakeholders* memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga kepentingan yang ada tidak hanya berfokus pada

satu *stakeholders* saja melainkan melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Mathis (dalam Pramesti dkk., 2024) menyatakan terdapat tiga peran *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program, yakni:

1. Regulator, pihak yang berperan dalam merancang dan membuat suatu peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata.
2. Fasilitator, pihak yang berperan dalam memberikan dukungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah.
3. Pelaksana atau pengelola, pihak yang berperan dalam melaksanakan dan mengelola objek wisata.

Siagian (dalam Bramana, 2018) mengelompokkan peran *stakeholders* pada program pembangunan dan pengembangan diantaranya sebagai berikut :

1. Modernisator, dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk mendorong masyarakat menuju modernisasi pembangunan dengan meninggalkan pola dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak relevan dengan tata kehidupan saat ini.
2. Katalisator, dalam hal ini pemerintah memiliki peran mengendalikan faktor negatif yang berpotensi menghambat proses sehingga dapat memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh.

3. Dinamisator, dalam hal ini pemerintah memiliki peran memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat melalui sikap, tindakan, perilaku, serta cara kerja yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
4. Stabilisator, dalam hal ini peran *stakeholders* memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak memicu gejolak sosial dan dapat mengancam keutuhan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memiliki kemampuan selektif yang tinggi dan melaksanakan proses sosialisasi secara efektif.
5. Pelopor. dalam hal ini *stakeholders* bertindak sebagai *role model* (panutan) bagi masyarakat dalam bentuk produktif dalam bekerja, menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan berkorban demi kepentingan negara.

Menurut Nugroho dkk., (2014) menyatakan bahwa pada saat menganalisis peran *stakeholders* dalam implementasi suatu kebijakan, *stakeholders* dapat diklasifikasikan berdasarkan peran dan tugasnya masing-masing, yakni :

1. *Policy creator*, pihak yang mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan merancang kebijakan yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintahan.

2. Koordinator, pihak yang mempunyai peran untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat. Adapun koordinasi yang terjadi dilakukan secara internal dan eksternal.
3. Fasilitator, pihak yang memiliki peran dalam menunjang dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses kerjasama dalam suatu kegiatan. Fasilitator juga berperan untuk menerapkan aturan main, melakukan kegiatan berdasarkan pada prosedur yang telah diatur dalam petunjuk teknis serta penyelesaian permasalahan dan penguatan lembaga.
4. Implementor, pihak yang memiliki peran menyelenggarakan tindakan tindakan nyata dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Seorang implementor perlu untuk memperhatikan beberapa hal terkait perannya yakni komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.
5. Akselerator, pihak yang memiliki peran untuk mendukung dan mempercepat keberjalanan suatu kebijakan atau program sehingga dapat dilaksanakan sesuai sasaran dan waktu pencapaiannya lebih cepat serta mengurangi hambatan yang menghambat proses kemajuan program.

Berdasarkan beberapa teori peran *stakeholders* di atas, dalam analisis peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang untuk

mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders* peneliti menggunakan teori Nugroho dkk., (2014) yakni *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Hal ini karena teori Nugroho dapat menjelaskan secara rinci mengenai peran *stakeholders* mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan implementasi kegiatan atau program. Dengan demikian, dapat diketahui peran *stakeholders* yang terlibat dan klasifikasinya pada pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

1.6.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Peran *Stakeholders*

Husnul Yakin (dalam Satia & Safitri, 2018) menyatakan bahwa terdapat empat faktor penentu yang dapat mendorong dan menghambat peran *stakeholders* dalam proses implementasi suatu kebijakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Partisipasi *stakeholders*

Partisipasi *stakeholders* merupakan peran serta individu atau sejumlah individu dalam berbagai tahap kegiatan, program, atau kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa pemberian pendapat, saran, ide, tenaga, waktu, keahlian maupun modal serta turut merasakan manfaat hasil kegiatan pembangunan itu sendiri.

2. Aksesibilitas *stakeholders*

Aksesibilitas *stakeholders* adalah kemudahan yang dimiliki oleh para *stakeholders* dalam mendapatkan informasi, sumber daya atau kemampuan dari atas maupun bawah untuk mempengaruhi suatu kebijakan, keputusan atau program.

3. Perspektif *stakeholders*

Perspektif *stakeholders* adalah sikap, pandangan, dan sudut pandang yang dimiliki oleh para *stakeholders* tertentu terhadap suatu situasi, konteks atau proses yang ada.

4. Penentu tindakan

Penentu tindakan adalah aspek atau elemen yang mempengaruhi atau menentukan seseorang atau sekelompok orang dalam membuat keputusan dan bertindak dalam situasi tertentu.

1.6.10 Pariwisata

Pratiwi dkk., (2024) mengemukakan bahwa pariwisata merupakan serangkaian kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kedatangan, kunjungan serta pergerakan wisatawan di suatu wilayah. Aktivitas ini mencakup berbagai sektor yang saling berhubungan, seperti akomodasi, transportasi, dan jasa terkait lainnya yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan industri pariwisata daerah tersebut. Selanjutnya, menurut Mumu dkk., (dalam Qotrunnada & Karmilah, 2024) menyatakan bahwa kata pariwisata terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” yang berarti

berkali-kali dan “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian, pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berulang kali. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke suatu tempat di luar lingkungan sehari-hari mereka, dengan tujuan untuk menikmati pengalaman, rekreasi, atau memperoleh pengetahuan.

Jenis-jenis pariwisata menurut Sammeng (dalam Hariawan et al., 2020), sebagai berikut :

1. Pariwisata Budaya

Bentuk pariwisata yang mengarahkan perjalanan wisata dengan memberikan manfaat langsung bagi wisatawan melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama berwisata, seperti mengunjungi situs bersejarah, mengenal adat atau tradisi lokal, menghadiri seni daerah, dan menyaksikan atraksi budaya masyarakat setempat. Tujuan dari objek wisata budaya adalah memperkenalkan, melestarikan, dan mengedukasi pengunjung tentang kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa.

2. Pariwisata Alam

Bentuk pariwisata yang berfokus pada kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki keindahan atau kekayaan alam, seperti pegunungan, pantai, hutan, air terjun, danau, atau taman nasional.

Pariwisata ini bertujuan untuk menikmati, mengeksplorasi, atau belajar tentang lingkungan alam sambil menjaga kelestariannya.

3. Pariwisata Minat Khusus

Bentuk pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik wisatawan yang memiliki minat atau hobi tertentu. Jenis pariwisata ini melibatkan aktivitas yang lebih fokus dan mendalam, seperti wisata petualangan, ekowisata, wisata olahraga, wisata kuliner, wisata pendidikan, serta wisata kesehatan.

Berdasarkan jenis jenis pariwisata seperti yang telah dijelaskan tersebut, objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa termasuk dalam pariwisata budaya karena objek wisata ini mengandalkan historis sejarah melalui monumen, museum dan cerita-cerita yang diwariskan. Dengan mengunjungi tempat ini, wisatawan mengenal lebih mendalam tentang budaya perjuangan, nilai-nilai patriotisme, serta menghormati jasa para pahlawan.

1.6.11 Pengembangan Pariwisata

Dalam keberlangsungannya pariwisata sendiri tidak terlepas dengan adanya pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata menurut Salsabela dkk., (2024) adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi sektor pariwisata pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Berbeda halnya dengan Munasef

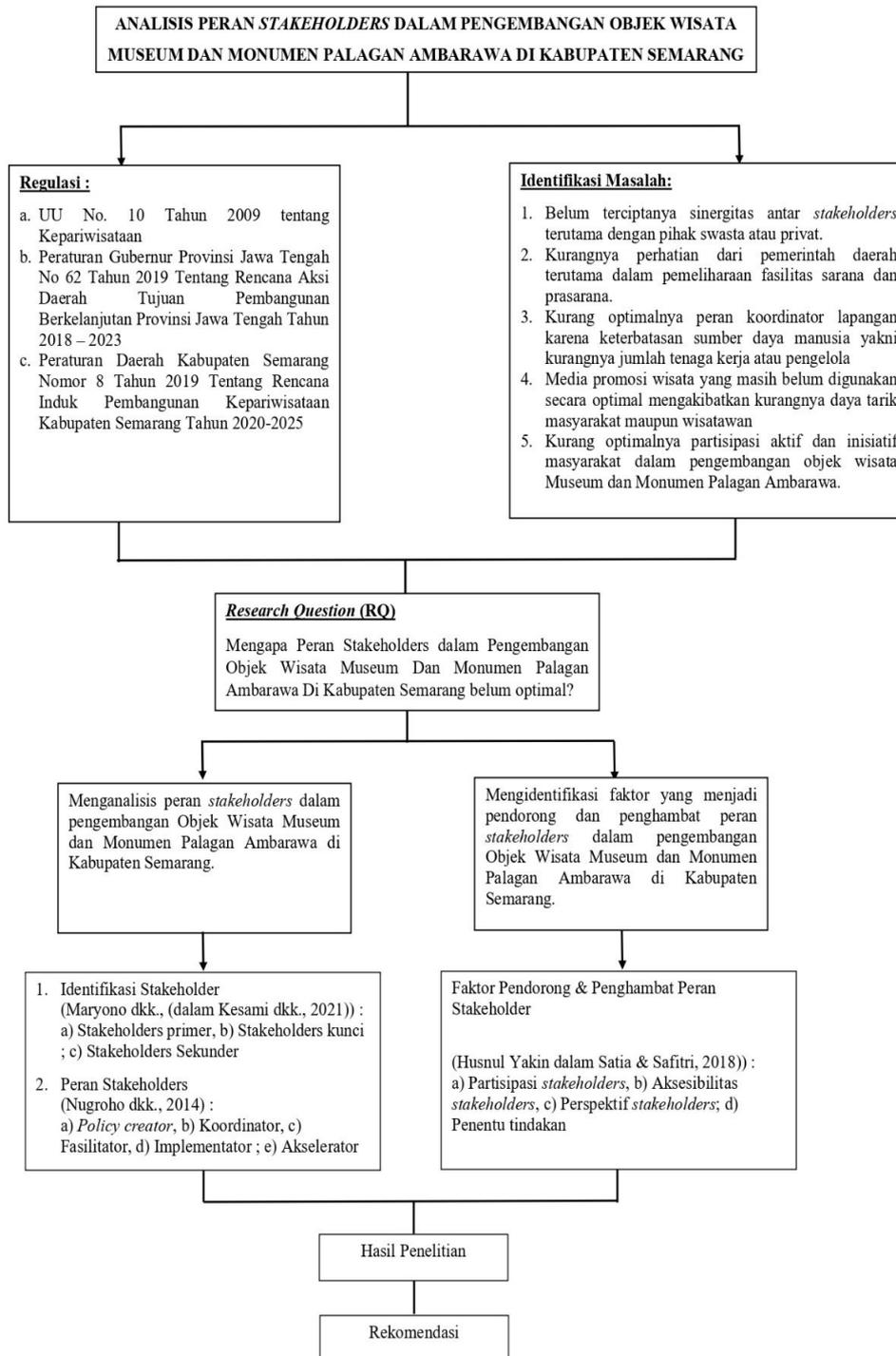
(dalam Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) yang mendefinisikan pengembangan pariwisata sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi guna menarik para pengunjung. Kegiatan ini juga mencakup penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta barang dan jasa yang diperlukan oleh para wisatawan selama berkunjung.

Dalam pengembangan pariwisata terdapat komponen kepariwisataan sebagaimana yang dinyatakan oleh Meutuah dkk., (2023) yaitu 6A yang meliputi :

- a. *Attraction* (Atraksi), yaitu sesuatu yang memiliki daya tarik yang kuat sehingga mampu menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi tujuan wisata tertentu.
- b. *Accessibilities* (Akses), merujuk pada kemudahan bagi para wisatawan untuk mencapai dan mengakses suatu destinasi pariwisata sehingga memungkinkan wisatawan tersebut dengan mudah mengunjungi dan menikmati objek wisata.
- c. *Amenities* (Fasilitas Pendukung), merujuk pada sarana dan prasarana penunjang yang ada guna meningkatkan kepuasan, kenyamanan dan pengalaman wisatawan selama berkunjung ke suatu destinasi wisata.
- d. *Accommodation* (Akomodasi), merujuk pada penyediaan fasilitas tempat tinggal atau penginapan selama wisatawan mengunjungi destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan.

- e. *Activities* (Aktivitas), merujuk pada serangkaian kegiatan atau pengalaman yang dapat didapatkan oleh para wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik pariwisata.
- f. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung), merujuk pada berbagai pelayanan tambahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan mendukung pengalaman wisatawan selama berkunjung.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.7 Kerangka Pikir Penelitian

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan konsep-konsep yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Operasionalisasi konsep digunakan sebagai batasan konsep sekaligus menjadi pedoman dalam proses penelitian. Berdasarkan teori para ahli yang telah digunakan maka fokus untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang, sebagai berikut :

1. Identifikasi *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang berdasarkan posisi, pengaruh dan kekuatannya yang terbagi menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut :
 - a. *Stakeholders* primer merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terdampak secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan.
 - b. *Stakeholders* sekunder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan.
 - c. *Stakeholders* kunci merupakan pihak-pihak yang memiliki tingkat pengaruh yang signifikan dan mempunyai kewenangan tinggi dalam menentukan arah kebijakan.

2. Peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa digunakan untuk melihat peran dan tugas dari pihak-pihak yang terlibat, meliputi:
 - a. *Policy creator*, peran *stakeholders* dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
 - b. Koordinator, peran *stakeholders* dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan dengan berbagai *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
 - c. Fasilitator, peran *stakeholders* dalam memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
 - d. Implementator, peran *stakeholders* yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan atau kegiatan dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
 - e. Akselerator, peran *stakeholders* yang turut terlibat dalam mempercepat dan mendukung proses pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.

3. Faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* adalah faktor-faktor yang berdampak terhadap seluruh aspek kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa, sebagai berikut :
- a. Partisipasi *stakeholders* adalah keterlibatan aktif dari berbagai *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
 - b. Aksesibilitas *stakeholders* adalah kemudahan *stakeholders* dalam mendapatkan informasi terkait pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
 - c. Perspektif *stakeholders* adalah pemahaman *stakeholders* terkait dengan pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
 - d. Penentu tindakan adalah elemen yang mempengaruhi keputusan dan tindakan *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.

Tabel 1.7 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Gejala	Gejala yang diamati dilapangan
Identifikasi <i>Stakeholders</i>	<i>Stakeholders</i> Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang memberikan pengaruh secara langsung dan paling signifikan 2. Pihak yang memiliki kepentingan langsung dan paling signifikan terhadap suatu kebijakan atau program

Fenomena	Sub Gejala	Gejala yang diamati dilapangan
	<i>Stakeholders</i> Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang mempunyai kepentingan secara tak langsung dalam pengambilan keputusan 2. Pihak yang tidak memiliki kepentingan, namun mempunyai kepedulian
	<i>Stakeholders</i> Kunci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang memberikan pengaruh signifikan dan memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan 2. Pihak yang memberikan dampak tidak langsung dalam suatu program
Peran <i>Stakeholders</i>	<i>Policy creator</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan setiap <i>stakeholders</i> dalam penyusunan kebijakan 2. Kejelasannya adanya kebijakan dan peraturan
	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan setiap <i>stakeholders</i> dalam proses koordinasi 2. Pihak yang menjadi koordinator utama 3. Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan <i>stakeholders</i> lain 4. Keberjalanan pelaksanaan koordinasi
	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan 2. Pihak mana yang menjadi fasilitator utama 3. Bentuk fasilitas yang diberikan 4. Keberjalanan pemberian dalam pemberian fasilitasi yang diberikan
	Implementator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi dan kedudukan setiap <i>stakeholders</i> 2. Cara implementasi program
	Akselerator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang memastikan agar pengembangan objek wisata terlaksana dengan tepat sasaran 2. Bentuk kontribusi yang dilakukan untuk memastikan pengembangan objek wisata terlaksana dengan tepat sasaran
Faktor pendorong dan penghambat	Partisipasi <i>stakeholders</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan kebijakan 2. Penyampaian aspirasi

Fenomena	Sub Gejala	Gejala yang diamati dilapangan
yang mempengaruhi peran <i>stakeholders</i>	Aksesibilitas <i>stakeholders</i>	1. Kemudahan mendapatkan informasi 2. Keterbukaan informasi terkait pengembangan objek wisata
	Perspektif <i>stakeholders</i>	1. Pemahaman tugas dan kewajiban <i>stakeholders</i> 2. Pemahaman masalah pengembangan objek wisata
	Penentu tindakan	1. Pedoman pelaksanaan pengembangan objek wisata 2. Kejelasan rencana kerja pengembangan wisata
	Partisipasi <i>stakeholders</i>	1. Keikutsertaan <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan kebijakan 2. Penyampaian aspirasi

Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

1.9 Argumen Penelitian

Elistia (2020) menyatakan bahwa sektor pariwisata memiliki peranan penting guna meningkatkan pendapatan daerah, penerimaan devisa negara, serta pengembangan suatu wilayah. Sementara itu, keterlibatan *stakeholders* yang dilakukan secara optimal sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Indah dan Risty (2024) menyatakan bahwa *stakeholders* memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata karena peran *stakeholders* berkontribusi dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Adapun salah satu objek wisata di Kabupaten Semarang yang membutuhkan peran *stakeholders* yang lebih optimal yakni objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa. Akan tetapi, peran *stakeholders* pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa tersebut belum dilakukan secara optimal.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Desain atau tipe penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan metodologi pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Basrowi & Suwandi (2008) adalah jenis metode penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan penafsiran yang berkaitan tentang realitas yang diperoleh melalui cara berpikir induktif. Selanjutnya, Moleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Pendekatan ini menjelaskan temuan penelitian secara deskriptif. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian bersifat subjektif, dimana peneliti mengamati fakta berdasarkan fenomena yang ada dan memberikan interpretasi sesuai dengan perspektif, nilai-nilai, dan pandangannya.

Dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan analisis metode deskriptif kualitatif sebab penelitian ini memuat data dalam bentuk kata kata mengenai hasil lapangan serta hampir tidak dinyatakan dengan angka. Azwar (2015) menyatakan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait subjek penelitian berdasarkan pada

data yang diperoleh dari variabel-variabel yang ada pada kelompok subjek yang diteliti. Pemilihan desain penelitian kualitatif deskriptif karena pada permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Di Kabupaten Semarang yang bersifat dinamis.

1.10.2 Lokus dan Fokus Penelitian

1.10.2.1 Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian dilakukan yang di dalamnya juga mencakup berbagai elemen seperti pada kegiatan yang menjadi objek observasi dalam penelitian tersebut (Nasution, 2023). Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka penetapan lokus penelitian ini adalah objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Kabupaten Semarang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena melihat perkembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 – 2023 yang mengalami stagnasi serta memperhatikan permasalahan lain yang ada pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa akibat belum optimalnya peran *stakeholders*.

1.10.2.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah pokok yang berasal dari pemahaman peneliti, sekaligus menjadi pusat perhatian dalam

memperjelas dan membatasi topik yang akan diteliti Moleong (2017). Fokus penelitian ini adalah mengetahui peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Di Kabupaten Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau disebut informan penelitian menurut Afrizal (2014) adalah individu atau pihak yang menyatakan informasi maupun data kepada peneliti atau pewawancara tentang dirinya, orang lain, kejadian atau lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan dalam penelitian yang pada awalnya ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, namun apabila di lapangan ternyata memerlukan informasi yang lebih dari sebelumnya maka informan lain dapat ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

1. Teknik *purposive sampling* adalah metode pemilihan informan utama yang memiliki pengetahuan secara mendalam terkait informasi yang dibutuhkan. Pemilihan informan ini dilakukan secara terencana berdasarkan kriteria tertentu seperti penguasaan informan terhadap permasalahan, kepemilikan data yang relevan dan kemampuannya memberikan jawaban yang akurat terhadap pertanyaan penelitian (Moleong, 2017).

2. Teknik *snowball sampling* adalah metode pemilihan informan yang semula dalam jumlah sedikit, kemudian berkembang secara bertahap seiring rekomendasi dari informan yang sebelumnya telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling* (Moleong, 2017).

Pada penelitian ini, adapun daftar informasi yang dijadikan oleh penulis sebagai subjek penelitian ini diantaranya, sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
Sub Koordinator Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dipilih sebagai informan utama dari pihak pemerintah karena memiliki peran di bidang pariwisata yaitu kewenangan pada ranah pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang salah satunya objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
2. Sub Koordinator Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
Sub Koordinator Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dipilih sebagai informan dari pihak pemerintah yang mempunyai peran dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Semarang termasuk objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) objek wisata

Kepala UPTD objek wisata juga merupakan bagian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai *stakeholders* pihak pemerintah. Kepala UPTD memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Semarang termasuk objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

4. Koordinator pengelola objek wisata

Koordinator lapangan pengelola objek wisata merupakan bagian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai *stakeholders* pihak pemerintah. Koordinator lapangan ditugaskan langsung di objek wisata yang peran pemeliharaan dan pengawasan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

5. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dipilih dalam penelitian ini karena sebagai *stakeholders* dari pihak masyarakat yang juga memiliki peranan penting dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

6. Wisatawan lokal

Sama halnya dengan pelaku usaha, masyarakat atau wisatawan lokal Museum dan Monumen Palagan Ambarawa menjadi *stakeholders* dari pihak masyarakat yang juga memiliki

kontribusi penting dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

1.10.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif menurut Moleong (2017) adalah data yang dihasilkan melalui pengumpulan teks atau kata kata tertulis yang selanjutnya dianalisis untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini data kualitatif dalam digunakan untuk mendeskripsikan peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi peran *stakeholders* tersebut.

1.10.4.2 Sumber Data

Sumber data dikategorikan berdasarkan dari asal sumbernya yakni terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder (Azwar, 2015). Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, sebagai berikut :

1. Data Primer menurut Azwar (2015) adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumbernya melalui berbagai hasil kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait atau informan

yang memiliki pemahaman mendalam mengenai topik yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder menurut Azwar (2015) adalah data yang didapatkan penulis secara tak langsung yakni melalui pihak lain maupun dari data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder bersifat sebagai data yang mendukung dan melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu peraturan kepariwisataan, data BPS, data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, dan artikel jurnal maupun berita lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data, keterangan, kenyataan dan informasi yang dibutuhkan peneliti (Sugiyono, 2015). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Teknik wawancara menurut Herdiansyah (2010) merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan dua pihak dengan tujuan tertentu, dimana pewawancara berperan sebagai pihak yang memberikan pertanyaan dan penjawab sebagai pihak yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini wawancara akan dilaksanakan sesuai pada pedoman panduan wawancara sebagaimana yang sudah peneliti rancang sebelumnya

yang berisikan pertanyaan pertanyaan pokok berdasarkan pada permasalahan penelitian.

2. Observasi

Teknik observasi menurut Herdiansyah (2010) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, baik secara langsung maupun tak langsung terkait fenomena sosial yang mencerminkan gejala-gejala psikis. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan bersifat non-partisipan, yakni peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa melainkan hanya melakukan pengamatan kemudian melakukan pencatatan dan pengidentifikasian aktivitas tersebut yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menurut Herdiansyah (2010) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau atau mengkaji dokumen yang dibuat oleh subjek maupun orang lain tentang subjek tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran dari pandangan subjek melalui dokumen tertulis, seperti dokumen pribadi, dokumen kebijakan, peraturan, buku, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori dan unit deskriptif dasar untuk menghasilkan tema yang kemudian dihasilkan sebagai hipotesis berdasarkan data yang tersedia (Basrowi & Suwandi, 2008). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) menguraikan mengenai tahapan dalam analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, merupakan tahap paling awal dalam penelitian kualitatif. Proses ini dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara dan dokumentasi atau menggabungkan dari ketiganya (triangulasi).
2. Reduksi data, merupakan tahap yang dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, mengkategorikan, serta membuat ikhtisar dari hasil data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. Penyajian data, merupakan tahapan dimana data yang telah direduksi selanjutnya dipresentasikan melalui langkah yang bermakna dan terstruktur berupa narasi kalimat, gambar atau tabel kerja. Tujuan penyajian data adalah untuk mengetahui pola yang signifikan dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan, merupakan tahapan penarikan kesimpulan berdasarkan pada data yang telah direduksi dan

disajikan. Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan analisis data yang dilakukan selama penelitian di lapangan.

Dengan dilakukannya tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka peneliti akan mampu menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan temuan yang relevan berkaitan dengan peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi peran *stakeholders*.

1.10.7 Kualitas dan Validitas Data

Triangulasi sumber dalam validitas data menurut adalah suatu pendekatan yang berfungsi memperkuat keabsahan data dan meminimalkan bias hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode yang dilakukan secara tidak bersamaan (Sugiyono, 2015). Terdapat tiga jenis dalam triangulasi menurut Sugiyono (2015), yakni :

1. Triangulasi sumber adalah proses untuk memverifikasi validitas data dengan cara memeriksa data yang berasal dari berbagai sumber data yang berbeda.
2. Triangulasi teknik adalah pemeriksaan validitas data yang dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai teknik, namun dengan sumber yang sama.

3. Triangulasi waktu adalah pengujian validitas data dengan memperhatikan perubahan waktu yang menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi kredibilitas data.

Dalam penelitian ini, kualitas data yang digunakan dengan menggabungkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Digabungkannya ketiga jenis triangulasi tersebut mengingatkan bahwa fokus penelitian mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang sehingga memerlukan pemeriksaan data dari sumber yang berbeda guna memastikan kevalidan dan keabsahan data yang diperoleh.